



**RCEP  
=  
AKSES  
OBAT MAHAL**



Indonesia for Global Justice

## Artikel Monitoring IGJ / 2018

### **Peran Parlemen Dalam Mengontrol Isi FTA Yang Berdampak Terhadap Akses Publik Atas Obat**

**U**paya organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong peran aktif parlemen dalam melakukan kontrol dan monitoring terhadap perundingan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang sedang dirundingkan oleh Pemerintah Indonesia telah menjadi target prioritas. Hal ini karena, dampak FTA khususnya terhadap isu kesehatan publik sangatlah besar. Sehingga peran parlemen sangat penting untuk memastikan bahwa isi FTA tidak bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak dasar publik.

Apalagi peran DPR RI, khususnya Komisi VI memiliki kewajiban menjaga kepentingan masyarakat dan sudah diamanatkan dalam Konstitusi pasal 11 ayat 2 UUD 1945 dan UU No 10 tahun 2004 yang mengatur tentang Perjanjian Internasional. Faktanya banyak perjanjian yang diratifikasi tanpa melibatkan DPR.

#### **Kolaborasi**

Paska Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia tertarik untuk ikut ke dalam Perjanjian Transpacific Partnership (TPP), publik ramai-ramai memberikan kecaman terhadap Pemerintah. Pembicaraan mengenai Perjanjian TPP yang controversial semakin massif, khususnya terkait dengan isu perlindungan hak kekayaan intelektual dan investasi yang dipercaya memiliki standar yang amat tinggi (golden standard). Termasuk upaya organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu kontroversi Perjanjian TPP bersama-sama dengan Parlemen.

Diskusi Seri pertama dilakukan pada 7 September 2016 diselenggarakan oleh Maju Perempuan Indonesia bersama-sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) dan Indonesia for Global Justice (IGJ) untuk mengkritisi Isi Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan rencana Presiden Joko

Widodo untuk mendorong Indonesia terlibat ke dalam TPP.

Kemudian diskusi ini dilanjutkan pada 8 Desember 2016 untuk membahas perundingan Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP) yang diyakini akan mengadopsi aturan-aturan perjanjian TPP kedalamnya. Diskusi kedua bertepatan dengan putaran perundingan RCEP ke-16 di Tangerang, Indonesia. Penyelenggaraan diskusi dilakukan atas kerjasama antara Green Economic Caucus DPR RI, Maju Perempuan Indonesia, ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan Indonesia for Global Justice.

dunia untuk memastikan Negara yang menjadi pelaku utama pasar tetap memainkan perannya. Ada pasar EU, TPP (Amerika), Afrika region dan ASEAN region. Indonesia saat ini sedang menjalankan sejumlah perundingan FTA seperti EU CEPA, RCEP dan mempertimbangkan untuk bergabung ke TPP.

Pasca Pemilu di Amerika Serikat yang menjadikan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih, ketidakpastian implementasi Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) semakin nyata setelah Donald Trump menyatakan tidak akan meratifikasi TPP. Ketidakpastian TPP ini pada akhirnya mendorong beberapa Negara anggota TPP seperti Jepang dan Australia untuk mengeksport aturan-aturan TPP ke dalam Perundingan ASEAN RCEP.

Isi Perjanjian TPP dikenal dengan standar emas yang lebih merepresentasikan kepentingan korporasi multinasional ketimbang perlindungan kepentingan nasional, khususnya perlindungan terhadap hak-hak dasar publik.

Kami mencatat bahwa model kerjasama ekonomi tersebut diatas bukan lagi hanya sekedar mengatur kerjasama perdagangan secara sempit

yaitu sekedar kegiatan ekspor-impor, tetapi juga hendak mengatur aspek ekonomi dan social secara luas dan berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat Indonesia, bahkan kedaulatan Negara ikut dipertaruhkan didalamnya.

Pengaturan perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional Mega FTA yang lebih comprehensive ini, atau dikenal dengan istilah WTO Plus, akan menimbulkan potensi dampak yang luas terhadap ruang-ruang kebijakan publik. Tidak hanya terkait dengan potensi ancaman atas ketidak-adilan pembangunan ekonomi, tetapi juga terancamnya pemenuhan hak-hak social dan ekonomi masyarakat.



Diskusi RCEP dengan DPR-RI

Dari beberapa diskusi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil Indonesia dengan Parlemen paling tidak menghasilkan beberapa pandangan kritis bersama terhadap perjanjian FTA yang memiliki dampak langsung terhadap hak dasar publik, khususnya isu kesehatan dan akses obat.

### Catatan Kritis Terhadap Mega FTA

Dalam 30-50 tahun terakhir terjadi perubahan anatomi erkonomi dunia yang berdampak pada perubahan ekonomi dunia baik dalam bentuk Bilateral atau kawasan. Sistemnya berubah dari konvensional antara satu Negara dengan Negara lain, terjadi pertarungan ruang ekonomi di tingkat

## Aturan Mengenai Intellectual Property Rights (IPR) Menghilangkan Akses Rakyat Terhadap Obat Murah

Hari ini kita menghadapi ketidakadilan, dimana lebih dari 90% kematian dan penyakit menular terjadi di Negara berkembang. Beberapa alasan yang menyebabkannya adalah harga obat terlalu mahal, tidak tersedia karena tidak ada dana. Tantangan ini bukan milik kita sendiri tapi menjadi milik pemerintah, lembaga Internasional, industry farmasi dan CSO lainnya.

Perlindungan hak paten terhadap perusahaan farmasi di dalam isu obat-obatan, tidak hanya di dalam TRIPs maupun di dalam aturan FTA lainnya, akan memonopoli produksi dan harga obat. Ketentuan ini akan menunda produksi obat generic. Setelah tahun 2005 sejak TRIPs ditandatangani harga obat sangat tinggi, seperti pengobatan Hep-C (sofosbuvir) \$84.000 per 6 bulan, Kanker treatment \$2000 per bulan dan obat TB \$1700 per 6 bulan.

Di dalam TPP, ASEAN RCEP, dan EU CEPA, aturan perlindungan hak paten akan semakin dibuat lebih tinggi atau dikenal dengan istilah TRIPs Plus, seperti penerapan aturan perlindungan Data Eksklusivitas, memperpanjang waktu perlindungan paten (lebih dari 20 tahun), maupun IP Enforcement salah satunya melalui mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Padahal dengan memproduksi obat-obatan generic (obat tanpa paten) Negara dapat menurunkan harga obat dan menjamin biaya pengobatan menjadi lebih murah. Pengalaman di India yang memproduksi obat generic sendiri dapat menurunkan harga obat HIV dari US\$ 4900/ bulan menjadi US\$ 12/bulan, Hepatitis C dari US\$ 49.000/ bulan menjadi US\$ 151/bulan, dan Kanker dari US\$ 11.595/bulan menjadi US\$ 111/bulan.

## Aspek HAM Dalam FTA

Liberalisasi ekonomi dan investasi di dalam aturan

FTAs seperti RCEP, EU CEPA, dan TPP akan mendorong pembukaan investasi skala besar yang pada akhirnya akan memberikan dampak besar terhadap kontrol, perubahan atau bahkan merusak dari (1) sumber mata pencaharian petani lokal, nelayan, dan peternak; (2) meningkatnya masalah ekologi dan lingkungan; (3) Kehilangan hak Budaya terhadap tanah, (4) akses untuk mendapatkan obat-obatan yang terjangkau untuk masyarakat.

Hak Asasi Manusia tidak dapat diperdagangkan atau dijadikan komoditas sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan internasional atau FTA. Mereka mengikat secara hukum setelah negara secara sukarela mengesahkan perjanjian hak asasi manusia, dan karena setiap negara merupakan pihak setidaknya dalam satu perjanjian hak asasi manusia internasional, mereka semua memiliki kewajiban yang mengikat hukum internasional hak asasi manusia.



*Diskusi TPP bersama sejumlah anggota DPR RI*

Untuk itu aspek perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia wajib dijadikan dasar keputusan utama Negara ketika memutuskan akan mengikatkan dirinya ke dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas internasional. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan Parlemen antara lain:

1. Human Rights, Environmental, and Social Justice Impact Assessment harus dijadikan “mandatory step” pada setiap keputusan Pemerintah

Indonesia untuk merundingkan FTAs.

2. Human Rights, Environmental, and social justice impact assessment ini harus dilakukan sebelum FTA ditandatangani dan wajib menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia untuk merundingkan FTAs.

3. Teks Perundingan dan proses perundingan FTA harus dibuka secara transparan kepada publik dan membuka ruang pendiskusian luas oleh seluruh pembuat kebijakan termasuk kelompok masyarakat sipil.

4. Mendorong seluruh Komisi DPR RI dan DPD RI untuk merespon, mengawal, dan membahas seluruh isi perundingan FTAs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia serta memastikan agar isi FTA tidak bertentangan dengan Konstitusi dan merugikan hak-hak dasar publik.

5. Menyusun strategi menyeluruh untuk menjadikan elemen ekonomi rakyat sungguh-sungguh menjadi kekuatan produksi, kekuatan rantai pasok, dan kekuatan konsumsi, yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

\*\*\*\*\*

**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :**

**Indonesia for Global Justice**

**Email: [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)**

**Telp: +62-21-7984552**

**Komplek PLN Jl.Laboratorium No.7, Pancoran, Jakarta Selatan,12760, Indonesia**

**[www.igj.or.id](http://www.igj.or.id) / FB: Indonesia for Global Justice Twitter: @IGJ2012 / Instagram: indoglobaljustice**



**INDONESIA**  
FOR GLOBAL JUSTICE